



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALAMSYAH PERKESI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN**
3. NHK : **198046**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.565.000.000**

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, LAINNYA Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA WAJO, WARISAN Rp. 125.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/120 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA WAJO, WARISAN Rp. 200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 550.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m2/101 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 248.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 177.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 402.773.573

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.392.773.573

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.392.773.573

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.